

## ABSTRAK

Pemilihan umum bagian salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Hak memilih merupakan bagian dari hak asasi manusia sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak memilih juga bagian dari Prinsip Perlindungan Anak sesuai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dengan Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak, anak bebas memberikan hak pilihnya sesuai dengan keinginannya tanpa tekanan dan diskriminasi manapun. Hak memilih melekat pada seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat tak terkecuali Anak binaan yang sedang menjalani masa hukuman atas tindak pidana yang telah dilakukannya tetap memperoleh hak memilih walau kemerdekaanya terbatas di dalam Lembaga pembinaan khusus anak. Anak binaan memiliki hak memilih yang sama namun, dengan pelaksanaan yang berbeda sesuai dengan keterbatasan kebebasan yang ada di dalam Lembaga pembinaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak memilih sebagai bagian dari penghargaan berpendapat Anak binaan yang berada di LPKA Kelas I Blitar.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris atau non-doktrinal yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan dari orang pertama yaitu responden, informan dengan wawancara atau observasi secara langsung berdasarkan permasalahan yang dikajikan, serta sumber data sekunder dari peraturan perundang-undangan. Data-data yang berhasil dikumpulkan dielaborasi dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi hak memilih Anak binaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar telah terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu, dan prinsip penghargaan pendapat anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Prinsip tersebut tercemin pada pemenuhan hak memilih anak dan adanya kebebasan memilih anak pada pemilu 2024 tanpa tekanan dari pihak Lembaga LPKA maupun KPU. Berbagai kendala juga terjadi dalam melaksanakan Pemilu 2024 yang harus diatasi adalah minimnya informasi politik yang seharusnya disediakan dari KPU, dan tidak kondusifnya proses pemilihan karena antar anak saling mempengaruhi pilihan berpotensi menyebabkan transparansi dan netralitas belum sepenuhnya terwujud.

**Kata kunci :** Pemilihan Umum - Hak Memilih, Anak Binaan, LPKA.

## ABSTRACT

*General elections are one of the pillars of democracy as a vehicle for realizing people's sovereignty in order to produce a democratic government. The right to vote is part of human rights in accordance with Article 43 paragraph (1) of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. The right to choose is also part of the Child Protection Principles in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection with the principle of respect for children's opinions, children are free to give their right to vote according to their wishes without any pressure or discrimination. The right to vote is inherent in all citizens who have met the requirements, including assisted children who are serving a sentence for a criminal act they have committed, still have the right to vote even though their freedom is limited in special child development institutions. Fostered children have the same right to choose, however, with different implementation according to the limited freedoms that exist within the fostering institution. Therefore, this research was conducted to determine the implementation of fulfilling the right to vote as part of the opinion award for assisted children in LPKA Class I Blitar.*

*The research method used is empirical or non-doctrinal juridical research, namely legal research regarding the application or implementation of normative legal provisions in action at each specific legal event that occurs in society. The data sources in this research are primary data sources obtained directly in the field from the first person, namely respondents, informants through interviews or direct observation based on the problems being studied, as well as secondary data sources from statutory regulations. The data that has been collected is elaborated on the theory and applicable laws and regulations.*

*The results of this research reveal that the implementation of the right to vote for assisted children in the Blitar Class I Special Development Institution for Children has been fulfilled and is in accordance with applicable laws and regulations regarding Elections and also the principles of child protection contained in Law Number 35 of 2014 concerning Protection Children is related to the principle of respect for children's opinions. This principle can be reflected in giving children the right to vote in the 2024 election and assisted children can freely give their choice without pressure from any party. Various obstacles also occurred in the implementation of the 2024 elections, starting from the lack of political information that should be provided from the KPU, as well as some of the foster children who were less conducive to turning their heads to the voting booth next to them, making transparency and neutrality still questionable.*

**Keywords :** *General Election, Voting Rights, Assisted Children, LPKA.*